

PENDIDIKAN INKLUSIF: PERAN TK DHARMA WANITA WANASABA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

Nurul Iman¹, Ani Endriani²

^{1,2} Universitas Pendidikan Mandalika

Email: nuruliman@undikma.ac.id

Abstrak; Pendidikan inklusif didasarkan atas pandangan bahwa semua anak berhak untuk masuk kesekolah reguler. Tugas sekolah adalah menyediakan kebutuhan semua anak, apapun derajat kemampuan dan ketidakkampuannya. Dalam pendidikan inklusif semua perbedaan harus dihargai, termasuk perbedaan ras, etnik, maupun latar belakang sosial dan budaya. Pendidikan inklusif tidak menuntut anak dengan kebutuhan khusus menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat normal tetapi mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. TK Dharma Wanita Wanasaba hadir untuk mengatasi dan memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus secara terpadu yakni memberikan kesempatan kepada anak luar biasa (berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Karena itu lembaga pendidikan TK dharma Wanita menerima peserta didik dari berbagai kalangan seperti anak yang memiliki kelainan digabungkan atau dipadukan dengan anak-anak normal pada umumnya dan diberikan pelayanan serta hak yang sama kepada seluruh peserta didiknya baik yang normal maupun mempunyai kelainan sehingga anak-anak dapat berkembang dan terstimulasi seluruh aspek perkembangannya dengan baik. Oleh karena itu prinsip mengedepankan pelayanan pendidikan untuk semua merupakan bagian dari program yang seharusnya dijalankan oleh satuan pendidikan atau yang disebut dengan pendidikan inklusif.

Kata Kunci: *Pendidikan Inklusif, Anak Berkebutuhan Khusus*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Usaha tersebut dilakukan oleh para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, namun sayangnya pendidikan yang pada dasarnya wajib diterima oleh setiap insan seperti yang terkandung dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yakni pendidikan bertujuan untuk mencetak anak-anak bangsa yang cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

Bertolak belakang dengan amanat undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, fungsi pendidikan yang sesungguhnya belum signifikan berpengaruh besar terhadap nasib dan masa depan anak bangsa khususnya dalam hal pelayanan yang maksimal dan merata dalam segala lini dan jenjang pendidikan. Ditengah-tengah berbagai masalah yang terjadi khususnya di bidang pendidikan terkait dengan *output* dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga pendidikan tertentu kepada anak bangsa dan salah satunya adalah lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang belum maksimal menjadi dilema dan pembicaraan serius di kalangan para aktor pendidikan khususnya.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) saat-saat ini sangat populer di mata masyarakat yang dipercaya untuk mengembangkan dan atau menstimulasi segala aspek perkembangan anak sejak usia dini. Kepercayaan penuh yang diberikan oleh para orang tua kepada para pendidik di lembaga PAUD tertentu seharusnya dan sebaiknya menjadi amanat yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh para pendidik.

Dalam menjalankan kepercayaan yang diberikan orang tua (wali siswa) dalam mendidik anak-anaknya ada satu hal yang saat ini di banyak lembaga PAUD yang belum memperhatikannya dengan baik. Hal tersebut adalah kealfaan para pendidik dalam mengaplikasikan prinsip pendidikan inklusif di lembaga PAUD tempatnya mengajar. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang tidak membedakan antara

peserta didik yang satu dengan yang lain dalam hal ini adalah anak yang normal maupun anak yang memiliki kelainan atau yang sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). Pendidikan inklusif merupakan konsep pendidikan yang tidak membedakan latar belakang kehidupan anak karena keterbatasan fisik maupun mental (Takdir Ilahi, 2013: 23).

Anak berkebutuhan khusus pada banyak lembaga Pendidikan Anak Usia Dini belum begitu menjadi perhatian khusus dalam pemberian perlakuan dalam pendidikan, hal ini terbukti mayoritas lembaga PAUD khususnya TK Dharma Wanita Wanasaba di Lombok Timur masih membedakan antara anak yang normal dengan anak yang berkelainan (menupakan hakikat dari pada pendidikan inklusif itu sendiri) artinya para pendidik tidak memberikan kesempatan yang sama dalam hal pemberian dan penerimaan pendidikan bagi anak normal maupun berkelainan. Oleh karena itu mengacu pada berbagai masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pendidikan Inklusif: Peran Lembaga TK Dharma Wanita Wanasaba Lombok Timur dalam Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)”.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yang berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan (Djunaidi dan fauzan, 2012: 25). Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti akan meneliti tentang peran lembaga PAUD dalam memberikan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Sementara strategi yang akan digunakan ialah strategi studi kasus, sebagaimana yang diterangkan oleh Creswell (2012: 20) bahwa studi kasus merupakan strategi dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan.

Sumber data dalam penelitian adalah informasi kunci di sekolah yaitu kepala sekolah dan guru tertentu, alasan ditetapkannya kepala sekolah atau yang lain sebagai informan kunci karena yang bersangkutan memiliki otoritas kepemimpinan tertinggi dalam satuan pendidikan, disamping itu, kepala sekolah dianggap sebagai seseorang yang paling mengerti dan bertanggung jawab terhadap berlangsungnya pendidikan di sekolah.

Informan selain kepala sekolah, peneliti juga akan mencari informan-informan lain yang dianggap dapat melengkapi informasi yang dibutuhkan. Informan-informan lain tersebut adalah para wakil kepala sekolah atau jabatan lain yang selevel, guru, pegawai, wali murid, siswa dan lainnya, yang ditentukan dengan teknik snowball sampling.

2. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Secara sederhana data ini disebut juga data asli, data primer dapat

diperoleh peneliti dengan melakukan wawancara secara langsung (*direct interview*) serta observasi secara langsung dan mendalam di lokasi penelitian. Yang menjadi sumber data primer terkait dengan penelitian ini adalah informasi dari kepala sekolah beserta komite sekolah TK Dharma Wanita Wanasaba Lombok timur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dari dokumen ataupun orang tua siswa atau yang lain. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau majalah sebagai penunjang dari data primer. Sumber ini biasanya berbentuk dokumen-dokumen, seperti data tentang demografis suatu daerah, geografis, jumlah siswa dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu (Junaidi dan Fauzan, 2012: 165). Hal ini juga Creswell (2012: 267) mengemukakan observasi kualitatif merupakan observasi yang di dalamnya peneliti langsung turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.

Menurut Sanafiah Faisal yang dikutip oleh Sugiyono (2012:310) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Akan tetapi dalam penelitian ini jenis observasi yang akan digunakan ialah observasi terus terang atau tersamar.

Peneliti akan menggunakan jenis observasi tersebut karena peneliti sudah mengetahui apa masalah yang akan diteliti dan peneliti juga mengungkapkan maksud penelitian kepada sumber data yang diteliti, akan tetapi tidak semua yang menjadi sumber data penelitian tahu maksud dari penelitian karena beberapa pertimbangan. Peneliti akan menggunakan jenis observasi tersebut karena menurut Sugiyono (2012:312) bahwa peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus, maka peneliti tidak akan dijanjikan untuk melakukan observasi. Penelitian ini juga tidak semua data akan diambil secara terang-terangan, karena dikhawatirkan tidak mendapatkan data yang sebenarnya.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Rianto, 2010:72). Begitu juga Irawan (2008:67) mengemukakan bahwa wawancara adalah pengumpulan data dengan

mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.

Esterberg dalam Sugiyono (2012:319) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Akan tetapi dalam penelitian ini akan menggunakan jenis wawancara tak terstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data-nya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Peneliti akan menggunakan jenis wawancara tak berstruktur ini karena dalam penelitian ini peneliti tidak dapat menduga tentang data apa yang akan diperoleh, karena disini juga yang menjadi sumber datanya tidak sama, sehingga tidak mungkin akan menggunakan jenis pertanyaan yang sama untuk lebih mengungkapkan data yang sebenarnya dari sumber data.

c. Dokumentasi

Jika data diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau *literature study*. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain data-nya sudah matang atau jadi, dan disebut data sekunder. Surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dokumen dalam arti luas meliputi monumen, foto, tape, dan sebagainya (Rianto, 2010: 61).

Sementara Irawan (2008:70) mengemukakan studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Begitu juga, Creswell (2012: 267) dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti, koran, makalah, laporan kantor), dokumen privat (seperti, buku harian, diary, surat, e-mail).

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teknik pengambilan data dengan teknik dokumen karena, sumber data penelitian ini juga bersumber dari dokumen-dokumen baik yang ada di sekolah maupun yang ada di masyarakat.

A. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di TK Dharma Wanita Wanasaba Lombok Timur.

Pendidikan dapat diartikan secara umum sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Pendidikan inklusif di Indonesia merupakan implementasi dari tuntutan internasional dan nasional seperti yang tertuang dalam dokumen-dokumen, di antaranya, yaitu: *Declaration of Human Right 1948, Convention on Inclusive education 1994, The Dakar Statement 2000, serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Pendidikan memiliki makna yang lebih luas daripada sekolah dan sekolah luar biasa hanya salah satu bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus. Layanan pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus tidak hanya dapat dilakukan disekolah tetapi juga di luar sekolah, didalam keluarga ataupun klinik dan rumah sakit. Pendidikan inklusif di Indonesia, ditandai dengan adanya deklarasi menuju pendidikan inklusif yang merupakan suatu bentuk landasan yuridis atau landasan kebijakan bagi penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan antara layanan pendidikan anak normal dengan anak kebutuhan khusus dalam satu lembaga pendidikan di Indonesia.

Pendidikan inklusif didasarkan atas pandangan bahwa semua anak berhak untuk masuk kesekolah reguler. Tugas sekolah adalah menyediakan kebutuhan semua anak dalam komunitasnya, apapun derajat kemampuan dan ketidakmampuannya. Dalam pendidikan inklusif semua perbedaan dihargai, termasuk perbedaan ras, etnik, maupun latar belakang sosial dan budaya. Pendidikan inklusif tidak menuntut anak dengan kebutuhan khusus menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat normal tetapi mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Dalam pendidikan inklusif, pendidikan dipandang sebagai upaya pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimum dan terintegrasi agar semua anak kelak dapat memberikan kontribusinya dalam kehidupan masyarakat untuk kemaslahatan hidup bersama. Pendidikan inklusif bukan anak yang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum tetapi kurikulumlah yang harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan anak demi pengembangan semua potensi kemanusiaannya, di Indonesia dikenal sebagai Program Pembelajaran Individual, yaitu program pembelajaran yang dirancang berdasarkan kebutuhan khusus anak.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan untuk semua yang artinya tidak membeda bedakan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola TK Dharma Wanita Wanasaba menyatakan bahwa konsep pendidikan Inklusif sangat perlu untuk diterapkan pada pendidikan dengan jenjang apapun, karena hal tersebut akan memberikan kesempatan yang sama terhadap anak-anak dalam mengenyam pendidikan sejak usia dini.

Pelaksanaan dan penerapan konsep pendidikan inklusif di lembaga TK Dharma Wanita Wanasaba telah lama dilaksanakan oleh para pendidik, hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi semua anak untuk mengenyam pendidikan sejak usia dini dengan berbagai bentuk karakteristik anak ujar salah seorang pendidik TK Dharma Wanita Wanasaba Lombok Timur (Ibu Nurul Aini) di ruang kelas mengajarnya.

2. Peran Lembaga TK Dharma Wanita Wanasaba Lombok Timur Dalam Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak usia dini berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak terkecuali dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Namun, kenyataan di lapangan, masih ditemukan adanya orang tua ABK yang enggan untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pada dasarnya hampir semua orang tua mempunyai harapan dan keinginan untuk memiliki anak yang normal tanpa adanya kekurangan. Namun, harapan para orang tua itu tidak seluruhnya terkabul. Terkadang ada orang yang tua memiliki anak dengan keterbatasan dan kekurangan, sehingga tidak jarang ada sebagian orang tua merasa malu dan tidak tertarik menyekolahkan anak yang berkebutuhan khusus itu ke lembaga pendidikan.

Kemudian belum lagi persoalan terkait biaya sekolah bagi anak berkebutuhan khusus yang cukup tinggi, semakin menguatkan alasan bagi sebagian orang tua anak berkebutuhan khusus untuk tidak memasukkan anaknya itu ke lembaga PAUD. Untuk mengubah pola pikir yang keliru dari para orang tua anak berkebutuhan khusus ini, dibutuhkan peran serta semua pihak. Pola pikir mereka perlu diperbaiki dengan melibatkan lingkungan tempat tinggal, instansi pemerintah hingga praktisi maupun pegiat yang berkecimpung di dunia pendidikan.

Selain itu, lanjut dia, pemahaman mereka terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus perlu diluruskan. Banyak cara yang bisa dilakukan, misalnya melalui kegiatan seminar maupun kegiatan parenting tentang anak berkebutuhan khusus. Orang tua yang

memiliki anak berkebutuhan khusus harus diberi pemahaman bahwa meski di satu sisi anaknya secara fisik memiliki keterbatasan, namun di sisi lain anak tersebut pada dasarnya juga memiliki kelebihan yang lain. Bahkan terkadang kelebihan yang dimiliki anak tersebut melebihi anak-anak normal. Pemerintah, lanjut dia, sebenarnya juga telah memberikan perhatian yang serius terhadap Anak Berkebutuhan Khusus.

Layanan pendidikan bagi anak dengan kebutuhan khusus tidak hanya dapat dilakukan di sekolah tetapi juga di luar sekolah, di dalam keluarga ataupun klinik dan rumah sakit. Jangan membedakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya, karna dibalik kekurangan anak berkebutuhan khusus terdapat kelebihan yang sederajat bahkan lebih dari anak normal lainnya.

Pemerintah juga mendorong seluruh lembaga PAUD agar menampung anak berkebutuhan khusus (ABK). Langkah ini dipandang perlu mengingat anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Salah satu faktor yang menyebabkan lembaga pendidikan anak usia dini belum mau melangkah untuk menampung anak berkebutuhan khusus adalah biaya yang dibutuhkan cukup tinggi. Selain harus memiliki sarana pembelajaran yang mendukung, lembaga juga harus memiliki tenaga pendidik maupun psikolog.

3. Faktor pendukung dan penghambat lembaga TK Dharma Wanita Wanasaba dalam memberikan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) Berdasarkan hasil penelitian Sunardi (dalam Sunaryo, 2009:10-12) terhadap 12 sekolah penyelenggara inklusif, secara umum saat ini terdapat lima kelompok issue dan permasalahan pendidikan inklusi di tingkat sekolah yang perlu dicermati dan diantisipasi agar tidak menghambat, implementasinya tidak bias, atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusi itu sendiri, yaitu: pemahaman dan implementasinya, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru, dan *support system*. Salah satu bagian penting dari *support system* adalah tentang penyiapan anak. Selanjutnya, berdasar isu-isu tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman inklusi dan implikasinya (a) Pendidikan inklusif bagi anak berkelainan/penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan *disabled children* ke sekolah regular dalam rangka *give education right* dan kemudahan access education, dan againt discrimination, (b) Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah dan (c) Dalam implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua, dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan.
- b) Kebijakan sekolah (a) Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait, (b) Masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus, serta keharusan orang tua anak berkebutuhan khusus dalam penyediaan guru khusus.

- c) Proses pembelajaran (a) Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi, (b) Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan *flexible curriculum*, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran, (c) Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar, (d) Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, sumber dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak, (e) Belum adanya panduan yang jelas tentang sistem penilaian. Sistem penilaian belum menggunakan pendekatan yang fleksibel dan beragam, (f) Masih terdapat persepsi bahwa sistem penilaian hasil belajar ABK sama dengan anak normal lainnya, sehingga berkembang anggapan bahwa mereka tidak menunjukkan kemajuna belajar yang berarti.
- d) Kondisi guru (a) Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Guru kelas masih dipandang *not sensitive and proactive yet to the special needs children*, (b) Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK, (c) Belum didukung dengan kejelasan aturan tentang peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing guru, (d) Pelaksanaan tugas belum disertai dengan diskusi rutin, tersedianya model kolaborasi sebagai panduan, serta dukungan anggaran yang memadai.
- e) Sistem dukungan (a) Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai. Peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi - LPTK PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas, (b) Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistis terhadap anaknya, (c) Peran SLB yang diharapkan mampu berfungsi sebagai resource centre bagi sekolah-sekolah inklusi di lingkungannya, belum dapat dilaksanakan secara optimal, baik karena belum adanya koordinasi dan kerja sama maupun alasan geografik. Peran ahli yang diharapkan dapat berfungsi sebagai media konsultasi, advokasi, dan pengembangan SDM sekolah masih sangat minimal. LPTK PLB dalam diseminasi hasil penelitian, penelitian kolaborasi maupun dalam implementasi terhadap hasil-hasil penelitaian belum dapat diwujudkan dengan baik. Peran pemerintah yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendorong implementasi inklusi secara baik dan benar melalui regulasi aturan maupun.

Rudiyati (2011:17) mengungkapkan bahwa kompetensi guru dalam sekolah inklusif belum memadai. Kompetensi guru yang belum memadai pada sekolah inklusif mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional untuk lebih jelasnya diuraikan berikut ini:

- a) Komponen kompetensi pedagogik, yang antara lain: menguasai karakteristik peserta didik yang berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dari aspek fisik, moral, sosial, cultural, emosional, dan intelektual. Pada umumnya guru sekolah inklusif belum secara memadai melakukan identifikasi dan atau asesmen terhadap karakteristik peserta didik yang berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus. Hal ini masih dilakukan sepenuhnya oleh Guru Khusus/ Guru Pembimbing Khusus; yang seharusnya dilakukan bersama-sama; sehingga hasil identifikasi dan asesmen tersebut dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pendidikan individual bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus yang bersangkutan. Pelaksanaan

program pendidikan individual bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dilakukan secara bersama oleh guru umum/reguler dan Guru Pendidikan Khusus/Guru Pembimbing Khusus di kelas reguler/inklusif maupun di ruang sumber/ruang bimbingan khusus.

- b) Komponen kompetensi kepribadian, antara lain: menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat; serta dalam memperlakukan peserta didik yang berkelainan /berkebutuhan khusus. Pada umumnya para guru umum/reguler dalam sekolah inklusif cenderung melindungi secara berlebihan terhadap anak berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus; atau sebaliknya menganggap bahwa mereka tidak mampu mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga kurang melibatkan yang bersangkutan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
- c) Komponen kompetensi sosial, antara lain: bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif terhadap peserta didik yang berkelainan/ berkebutuhan pendidikan khusus; karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. Pada umumnya para guru umum/reguler dalam sekolah inklusif masih cenderung tidak objektif dan diskriminatif dalam memberikan kesempatan berpartisipasi dalam pembelajaran bagi anak berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.
- d) Komponen kompetensi profesional, antara lain: mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri dalam pembelajaran peserta didik yang berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus.

B. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil analisis data bahwa TK Dharma Wanita Wanasaba hadir untuk mengatasi dan memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus secara terpadu yakni memberikan kesempatan kepada anak luar biasa (berkebutuhan khusus) untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Prinsip mengedepankan pelayanan pendidikan untuk semua merupakan bagian dari program yang seharusnya dijalankan oleh satuan pendidikan.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti menyatakan bahwa :

1. Bagi guru, diharapkan meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan inklusif dan pentingnya Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
2. Bagi kepala sekolah, diharapkan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran bagi Lembaga PAUD dalam Memberikan Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2010. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Basu, Swasta dan Irawan. 2008. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Creswell, John W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- <http://arifin-meaningoflife.blogspot.co.id/2012/11/pendidikan-inklusif-di-indonesia-akar.html>.
- <http://paud4a-uhamka.blogspot.co.id/2013/06/layanan-pendidikan-anak-usia-dini.html>.
- <http://rinitarosalinda.blogspot.co.id/2015/10/penyelenggaraan-pendidikan-inklusif.html>.
- Rudiyati, Sari. (2011). Potret Sekolah Inklusif di Indonesia. Makalah disampaikan dalam seminar umum “Memilih Sekolah yang Tepat Bagi Anak Berkutuhan Khusus” pada Pertemuan Nasional Asosiasi Kesehatan Jiwa dan Remaja (AKESWARI) pada tanggal 5 Mei 2011 di Hotel INA Garuda Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Takdir Ilahi, M. 2013. *Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi*. Ar-Ruz Media: Yogyakarta.